

Ketimpangan Paparan Risiko Bencana: Modal Sosial dalam Resiliensi Masyarakat Pascabencana di Kelurahan Kapalo Koto Kota Padang

Eva Dwi Iswari¹, Delmira Syafrini^{2*}, Fauzi Ariansyah³, Annisya Sukma Dewi⁴,
Syiva Rezki⁵, Daffa Febryan⁶, Roby Syafwar⁷, Nuwirman Nuwirman⁸

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Negeri Padang

^{7,8}LSM JEMARI Sakato

*Corresponding author, e-mail: delmirasyafrini@fis.unp.ac.id

Abstrak

Bencana banjir bandang yang terjadi di Kelurahan Kapalo Koto, Kota Padang, telah menimbulkan dampak yang signifikan dengan tingkat kerentanan yang tidak merata akibat adanya ketimpangan paparan risiko bencana. Perbedaan kondisi sosial-ekonomi, kepemilikan sumber daya, serta kapasitas adaptasi menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan yang bervariasi dalam proses pemulihan pascabencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan paparan risiko bencana serta mengkaji peran modal sosial dalam membangun resiliensi masyarakat pascabencana di Kelurahan Kapalo Koto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe kajian etnosains. Informan penelitian berjumlah 8 (delapan) orang yang dipilih secara *purposive sampling*, terdiri dari masyarakat terdampak bencana, tokoh masyarakat, pemuda setempat, dan korban bencana. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen yang dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan paparan risiko bencana terefleksi pada perbedaan tingkat kerusakan aset fisik, kehilangan mata pencaharian, serta kemampuan ekonomi pascabencana. Di tengah keterbatasan tersebut, modal sosial yang termanifestasi melalui praktik gotong royong, solidaritas, hubungan saling percaya, dan jaringan sosial antarwarga terbukti menjadi sumber daya kunci dalam memperkuat resiliensi kolektif. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan manajemen bencana tidak dapat hanya bertumpu pada mitigasi fisik, tetapi harus mengintegrasikan penguatan modal sosial sebagai variabel krusial dalam pemulihan berkelanjutan (*sustainable recovery*). Penelitian ini memiliki limitasi pada lingkup lokus yang spesifik, sehingga disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan wilayah penelitian dengan pendekatan kuantitatif atau metode campuran guna menguji peran kebijakan kelembagaan dan faktor ekonomi secara lebih komprehensif.

Kata Kunci: Banjir Bandang; Kapalo Koto; Modal Sosial; Resiliensi Masyarakat.

Abstract

The flash flood disaster that occurred in Kelurahan Kapalo Koto, Kota Padang has caused significant impacts with uneven vulnerability levels due to the disparity in disaster risk exposure. Differences in socio-economic conditions, resource ownership, and adaptive capacity have caused the community to experience varying difficulties in the post-disaster recovery process. This study aims to analyze the disparity in disaster risk exposure and examine the role of social capital in building community resilience post-disaster in Kapalo Koto Village. This study employs a qualitative approach with an ethnoscience research design. The eight research informants were selected using purposive sampling, consisting of affected community members, community leaders, local youth, and disaster survivors. Data were collected through observation, in-depth interviews, and document studies, which were then analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The results of the study indicate that the disparity in disaster risk exposure is reflected in the differences in the level of physical asset damage, loss of livelihood, and post-disaster economic recovery capabilities. Amidst these limitations, social capital manifested through practices of gotong royong (mutual cooperation), solidarity, mutual trust, and strong social networks proved to be a key resource in strengthening collective resilience. The implications of this study emphasize that disaster management policies cannot rely solely on physical mitigation but must integrate the strengthening of social capital as a crucial variable for sustainable recovery. This study is limited by its specific

research location; therefore, it is suggested that future researchers expand the study area using quantitative or mixed-methods approaches to more comprehensively examine the roles of institutional policies and economic factors.

Keywords: Community Resilience; Flash Flood; Kapalo Koto; Social Capital.

How to Cite: Iswari, E. D. et al. (2026). Ketimpangan Paparan Risiko Bencana: Modal Sosial dalam Resiliensi Masyarakat Pascabencana di Kelurahan Kapalo Koto Kota Padang. *Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2026. (pp. 52-63). Padang: Universitas Negeri Padang.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2026 by author.

Pendahuluan

Bencana alam tidak lagi dipahami sekadar sebagai fenomena biofisik atau peristiwa fenomena alam semata, melainkan sebagai peristiwa sosial yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Pada tingkat global, peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi dan geologi telah membuat komunitas internasional bergeser dari paradigma respons darurat menuju paradigma pengurangan risiko yang berpusat pada tingkat ketahanan atau resiliensi masyarakat (Rasyid & Suhaeb, 2023). Ketahanan ini bukan sekadar kemampuan fisik untuk pulih, tetapi mencakup proses adaptasi dan kerja sama masyarakat dalam menghadapi risiko bencana dalam mengelola risiko jangka panjang (Syaharani & Triyono, 2025). Ketika sebuah bencana menghantam instrumen struktural suatu wilayah, kemampuan adaptasi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sangat ditentukan oleh seberapa solid kesiapan internal komunitas tersebut sebelum kedatangan ancaman selanjutnya (Bakarbessy, 2024; Aditiya dkk., 2025).

Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan tanah longsor (bpkad.sumbarprov). Kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik geografis wilayah yang didominasi oleh perbukitan dan pegunungan Bukit Barisan serta tingginya intensitas curah hujan sepanjang tahun. Data BPBD Sumatera Barat menunjukkan bahwa selama periode 2014–2022 terjadi 6.274 kejadian bencana, dengan 1.161 kejadian tanah longsor (19,5%) dan 853 kejadian banjir (13,6%), menjadikan kedua bencana tersebut sebagai ancaman utama di provinsi ini. Kondisi tersebut tercermin pula pada Kota Padang yang merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi di Sumatera Barat. Berdasarkan data BPBD Kota Padang, selama sepuluh tahun terakhir telah terjadi 181 kejadian banjir dan 122 kejadian tanah longsor, menjadikan kedua bencana tersebut sebagai ancaman yang paling sering dihadapi masyarakat setempat (Mulia & Handayani, 2024). Selain itu, peningkatan curah hujan dari 3.478,2 mm/tahun pada tahun 2011 menjadi 4.697 mm/tahun pada tahun 2022 turut berkontribusi terhadap meluasnya kawasan rawan banjir di Kota Padang.

Kelurahan Kapalo Koto menjadi salah satu wilayah yang terdampak cukup ekstrem akibat bencana banjir bandang (galodo), yang kemudian mempertegas adanya ketimpangan dampak bencana di lapangan (padang.go.id). Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan akses informasi dan pemulihan, di mana sebelum bencana melanda, sistem peringatan dini (*early warning system*) berupa sirine dilaporkan tidak berfungsi atau terlambat diakses oleh warga secara merata (Nurmaliza et al, 2024). Akibat kondisi geografisnya, warga yang bermukim tepat di sepanjang pinggir daerah aliran sungai di kelurahan ini harus menanggung hantaman kerugian fisik yang ekstrem, mulai dari kehilangan tempat tinggal secara total, hilangnya surat-surat berharga, hingga hancurnya lahan pertanian (Mutia & Wijayanto, 2025). Kerusakan masif tersebut memaksa para penyintas untuk bertahan hidup di Hunian Sementara (Huntara) dengan kondisi yang serba terbatas dan ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan logistik periodik, sementara warga yang berada di zona geografis lebih tinggi di wilayah tersebut mampu melakukan pemulihan mandiri dengan jauh lebih cepat (Rizqiani et al, 2025).

Gejala kerentanan ini diperparah oleh faktor kesenjangan pemulihan ekonomi di antara sesama korban terdampak di Huntara Kapalo Koto. Sementara sebagian kecil warga yang memiliki pekerjaan di luar sektor informal atau memiliki tabungan cadangan mampu merancang ulang strategi bertahan hidup mereka, mayoritas warga informal seperti buruh tani dan pedagang kecil mengalami kelumpuhan total pada mata pencaharian mereka (Bakarbessy, 2024). Akibat hilangnya sawah dan keterbatasan modal, banyak kepala keluarga terpaksa beralih profesi menjadi buruh bangunan musiman atau penambang pasir sungai serabutan demi menyambung hidup (Sari & Handayani, 2022). Kondisi ekonomi yang tidak menentu ini berjalan beriringan dengan beban psikologis berupa trauma mendalam, terutama setiap kali hujan lebat mengguyur kawasan hulu Bukit Cendawan (Ningsih dkk., 2024; Syaharani & Triyono, 2025).

Selain itu, penyebab ketimpangan paparan risiko ini juga bersumber dari tata ruang permukiman yang mempertemukan kerentanan geografis dengan kemiskinan struktural. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah terpaksa menetap di area sempadan sungai atau zona rawan bencana karena keterbatasan akses finansial untuk memiliki lahan di kawasan yang lebih aman (Aditiya et al, 2025). Faktor objektif lainnya adalah lemahnya tata kelola infrastruktur mitigasi lokal, ketiadaan skema evakuasi inklusif, keterlambatan instalasi perangkat mitigasi teknologi, hingga belum optimalnya implementasi regulasi penanggulangan banjir di tingkat daerah akibat keterbatasan alokasi anggaran sosiologis (Rizqiani et al., 2025; Nuraliza et al, 2024). Akibatnya, keterbatasan ruang hidup secara geografis serta lemahnya pengawasan regulasi pertanahan ini mengunci masyarakat marjinal Kapalo Koto ke dalam posisi garis depan yang paling rentan terpapar bahaya (Sari & Handayani, 2022).

Kajian mengenai kebencanaan sosiologis telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu melalui berbagai sudut pandang eksternal maupun internal. Sebagai contoh, Hariadi (2025) berfokus meneliti tata kelola penganggaran rekonstruksi perumahan pasca bencana, sedangkan Adhiatsa, et.al. (2026) menganalisis ketahanan masyarakat melalui rekonstruksi infrastruktur fisik makro pasca-likuifaksi. Di sisi lain, peran penting modal sosial dalam memicu aksi kolektif masyarakat pasca bencana telah diuji secara spesifik oleh Kurnia & Pandjaitan (2021) pada komunitas rawan tsunami di wilayah pesisir. Selain itu, kajian dampak galodo umumnya didekati dari sisi perubahan kondisi sosial ekonomi murni (Mutia & Wijayanto, 2025), tata kelola respons kelembagaan pemerintah (Rizqiani et al., 2025), hingga konsep mitigasi yang bertumpu pada kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat adat setempat (Yolanda & Fahmi, 2025).

Namun demikian, mayoritas penelitian terdahulu tersebut cenderung memisahkan antara pemetaan risiko fisik dengan dinamika sosiologis masyarakat, serta belum banyak melihat hubungan antara ketimpangan dampak bencana, modal sosial, dan resiliensi masyarakat secara terintegrasi. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bahwa kemampuan masyarakat untuk bertahan dan pulih pascabencana tidak hanya ditentukan oleh bantuan material maupun kondisi geografis semata, tetapi juga dipengaruhi oleh kekuatan hubungan sosial yang hidup di dalam masyarakat. Daya tarik penelitian ini terletak pada penggunaan teori modal sosial yang dikemukakan oleh James Coleman yang memandang modal sosial sebagai sumber daya yang lahir dari hubungan sosial, kepercayaan, norma, dan jaringan antarindividu yang mampu mempermudah tindakan kolektif masyarakat dalam mencapai tujuan bersama (Coleman, 1988). Melalui perspektif tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana hubungan sosial masyarakat Kapalo Koto berperan dalam membangun solidaritas, memperkuat mekanisme bertahan hidup, dan mendorong resiliensi masyarakat pascabencana.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menunjukkan bahwa dampak bencana dirasakan secara berbeda oleh masyarakat. Melalui konsep ketimpangan paparan risiko bencana, penelitian ini memiliki daya tarik ilmiah karena mampu menyajikan deskripsi mendalam mengenai bagaimana modal sosial seperti ikatan gotong royong spontan, pembagian sembako gratis, dan adanya dukungan psikososial kolektif antarwarga yang bekerja sebagai substitusi atau pengganti dari kurangnya modal finansial pada masyarakat marjinal. Mengetahui dinamika ini menjadi sangat krusial agar kebijakan rehabilitasi pasca bencana di masa depan tidak lagi seragam (*one size fits all*), melainkan berbasis pada tingkat kerentanan masyarakat dan kesetaraan kapasitas sosial berdasarkan tingkat keparahan paparan riil di lapangan. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini secara eksplisit bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk ketimpangan paparan risiko bencana baik dari aspek fisik, ekonomi, maupun akses informasi pada masyarakat di Kelurahan Kapalo Koto, mengidentifikasi bentuk-bentuk modal sosial yang hidup dan bertahan di tengah masyarakat pascabencana dan menganalisis secara mendalam bagaimana peran modal sosial tersebut dalam membangun resiliensi masyarakat di Kelurahan Kapalo Koto dalam menghadapi fase pemulihan sosiologis jangka panjang.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian etnosains. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami pengalaman masyarakat, pengetahuan lokal, serta bentuk interaksi sosial masyarakat dalam menghadapi bencana di Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif teori modal sosial dari James Coleman untuk menganalisis hubungan sosial, kepercayaan, dan tindakan kolektif masyarakat dalam menghadapi situasi pasca bencana (Coleman, 1988). Penelitian dilakukan di Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada kondisi wilayah yang rawan terhadap banjir bandang (galodo) dan longsor serta adanya ketimpangan paparan risiko bencana di tengah masyarakat. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan penelitian ditetapkan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai tujuan penelitian (Sugiyono, 2018). Informan dipilih karena dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai kondisi

kebencanaan serta kehidupan sosial masyarakat. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri atas masyarakat terdampak bencana, tokoh masyarakat, pemuda setempat, dan korban bencana.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan dan aktivitas sosial masyarakat di kawasan rawan bencana. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai ketimpangan paparan risiko bencana, modal sosial, dan resiliensi masyarakat pascabencana. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan foto, catatan lapangan, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik melalui perbandingan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara mendalam yang dilakukan di lapangan, diperoleh gambaran komprehensif mengenai dinamika kehidupan masyarakat di Kelurahan Kapalo Koto pascabencana banjir bandang. Data lapangan menunjukkan bahwa dampak bencana tidak dirasakan secara merata, melainkan membentuk pola ketimpangan yang dipengaruhi oleh letak geografis, aksesibilitas informasi, dan kerentanan ekonomi warga. Di tengah tantangan tersebut, masyarakat menunjukkan kapasitas adaptif yang unik, di mana modal sosial dan resiliensi kolektif menjadi penopang utama dalam upaya pemulihan. Untuk menguraikan temuan tersebut secara sistematis dan mendalam, maka akan dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama yang saling berkaitan sebagai berikut:

Ketimpangan Paparan Risiko Bencana

Bencana banjir dan galodo yang melanda Sumatera Barat pada periode November hingga Desember 2025 memicu dampak yang sangat signifikan, di mana paparan risiko bencana tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat, termasuk masyarakat yang tinggal di Kelurahan Kapalo Koto Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Terdapat ketimpangan nyata dalam pengalaman kebencanaan yang tercermin dari disparitas dampak ekonomi, keterjangkauan akses informasi, serta kapasitas pemulihan pascabencana. Kelompok masyarakat yang bermukim di bantaran sungai dan kawasan yang terdampak langsung mengalami kerugian yang jauh lebih berat dibandingkan warga yang berada di lokasi yang relatif aman, sehingga menciptakan kerentanan yang lebih tinggi dalam upaya pemulihan kehidupan pascabencana. Informan MI (50 Tahun) yang merupakan salah satu masyarakat yang tinggal di bantaran sungai menjelaskan bahwa masyarakat yang tinggal di dekat sungai mengalami dampak paling berat karena kehilangan rumah, lahan pertanian, dan sumber mata pencaharian dalam waktu yang bersamaan. Sebagaimana hal itu terlihat pada kutipan wawancara oleh MI (50) sebagai berikut:

“...Kalau ngomongin soal dampak, kami warga yang tinggal di dekat sungai itu memang paling merasakan dampaknya. Waktu banjir datang, rumah-rumah banyak yang rusak bahkan ada yang hanyut terbawa arus. Selain kehilangan rumah, mereka juga kehilangan sawah dan kebun yang selama ini menjadi sumber penghidupan sehari-hari keluarga mereka. Banyak warga yang sebelumnya bergantung dari hasil bertani sekarang jadi kesulitan karena lahannya tertimbun lumpur, batu, dan kayu-kayu bekas banjir...” (Wawancara pada 09 Mei 2026).



Gambar 1. Kondisi Area Persawahan Pasca Banjir
Sumber: Dokumen Peneliti, 2026

Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar sungai mengalami dampak banjir yang sangat serius, baik secara fisik maupun ekonomi. Kerusakan rumah hingga kehilangan lahan pertanian mengindikasikan bahwa bencana tidak hanya menghancurkan tempat tinggal, tetapi juga

memutus sumber penghidupan utama warga yang bergantung pada sektor agraris. Kondisi ini memperlihatkan tingginya kerentanan masyarakat bantaran sungai terhadap risiko bencana, sehingga banjir tidak hanya dipahami sebagai peristiwa alam, tetapi juga sebagai faktor yang mengganggu keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.

Berdasarkan Gambar 1 di atas terlihat jelas bahwa kondisi lahan yang sebelumnya merupakan area persawahan kini telah hancur total dan tertutup hamparan material sedimen berupa batu besar serta bongkahan kayu, yang secara langsung melumpuhkan sumber utama mata pencaharian masyarakat setempat yang bergantung pada sektor pertanian. Kehilangan lahan produktif ini bukan hanya merusak struktur fisik lingkungan, tetapi juga menciptakan krisis ekonomi bagi para petani karena rusaknya sistem irigasi dan hilangnya lapisan tanah subur yang membuat lahan tersebut tidak dapat segera diolah kembali, sehingga menutup akses mereka terhadap pendapatan harian dan ketahanan pangan.

Selain dampak ekonomi, ketimpangan juga tampak pada akses informasi kebencanaan dan sistem peringatan dini. Ketidadaan sistem peringatan dini seperti sirine maupun media peringatan lainnya menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam distribusi informasi kebencanaan. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa sebelum banjir bandang terjadi, masyarakat tidak memperoleh informasi maupun peringatan resmi dari pihak terkait, sehingga mereka tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan evakuasi atau langkah antisipatif. Kondisi tersebut menegaskan adanya kelemahan dalam sistem mitigasi bencana yang berdampak pada meningkatnya kerentanan masyarakat terdampak. Temuan ini didukung oleh kutipan wawancara oleh informan MI (50) dan SA (50), yaitu sebagai berikut:

“...Tidak ada dek, kalau peringatan itu justru baru ada setelah bencana terjadi. Sebelum banjir bandang datang, masyarakat tidak ada mendapatkan informasi atau pemberitahuan resmi apa pun dari pihak terkait. Waktu itu kami hanya melihat hujan turun sangat deras dan air sungai mulai naik, tetapi tidak menyangka kalau banjir besar akan datang secepat itu. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem peringatan dini belum berjalan secara optimal, sehingga masyarakat tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk melakukan langkah antisipasi maupun evakuasi lebih awal...” (Wawancara pada 09 Mei 2026).

Temuan tersebut menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem peringatan dini bencana, di mana masyarakat tidak menerima informasi atau peringatan resmi sebelum banjir bandang terjadi. Akibatnya, warga hanya mengandalkan pengamatan langsung terhadap kondisi alam tanpa adanya arahan atau instruksi evakuasi dari pihak berwenang. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem mitigasi bencana belum berjalan secara efektif, sehingga meningkatkan kerentanan masyarakat karena tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan antisipasi maupun penyelamatan diri secara optimal.

Ketimpangan lainnya juga terlihat pada kemampuan masyarakat dalam melakukan pemulihan pascabencana. Sebagian warga yang mengalami kehilangan rumah secara total menghadapi kesulitan yang lebih besar, terutama karena wilayah terdampak telah ditetapkan sebagai zona merah sehingga tidak lagi dapat ditempati. Kondisi ini memperparah beban pemulihan karena masyarakat tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga harus mencari lokasi baru untuk menetap tanpa kepastian dukungan yang memadai. Sebagaimana diungkapkan oleh informan IN (40) sebagai berikut:

“...Kalau untuk membangun rumah baru di sini sudah tidak bisa lagi karena daerah ini sekarang sudah dianggap zona merah dan tidak aman untuk ditinggali. Jadi warga yang rumahnya rusak parah atau hilang total harus mencari tempat lain untuk tinggal sementara waktu. Kondisi ini membuat proses pemulihan menjadi semakin sulit karena masyarakat tidak hanya kehilangan aset fisik, tetapi juga harus memulai kembali kehidupan di tempat yang baru tanpa kepastian yang jelas terkait bantuan maupun relokasi yang berkelanjutan...” (Wawancara pada 09 Mei 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penetapan wilayah sebagai zona merah pascabencana berdampak langsung pada meningkatnya kesulitan pemulihan masyarakat terdampak. Warga yang kehilangan rumah tidak hanya menghadapi kerugian material, tetapi juga kehilangan akses terhadap ruang hidup yang sebelumnya mereka tempati. Kondisi ini memperlihatkan bahwa proses rehabilitasi belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian relokasi maupun dukungan berkelanjutan, sehingga masyarakat harus beradaptasi secara mandiri di tempat baru. Hal tersebut menegaskan adanya tantangan struktural dalam pemulihan pascabencana yang memperpanjang kerentanan sosial-ekonomi warga terdampak.

Secara keseluruhan, temuan penelitian di Kelurahan Kapalo Koto menunjukkan bahwa bencana banjir dan galodo bukanlah peristiwa yang memberikan dampak seragam, melainkan sebuah instrumen yang mempertegas ketimpangan struktural dengan membebankan risiko fisik dan kerugian ekonomi yang jauh lebih berat kepada masyarakat di bantaran sungai. Kerentanan ini semakin diperparah oleh absennya sistem peringatan dini resmi yang membatasi ruang antisipasi warga, serta adanya hambatan struktural dalam

proses pemulihan akibat penetapan zona merah yang memaksa korban menanggung beban relokasi secara mandiri. Dengan demikian, kerentanan di wilayah ini bersifat akumulatif, di mana masyarakat yang secara geografis berada di lokasi rawan tidak hanya terpapar ancaman fisik, tetapi juga menghadapi ketidakpastian sistemis dalam upaya pemulihan, yang menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi pascabencana sangat bergantung pada keberpihakan kebijakan mitigasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kelompok masyarakat paling rentan.

Modal Sosial Masyarakat dalam Menghadapi Bencana

Modal sosial masyarakat di Kelurahan Kapalo Koto terwujud melalui praktik gotong royong yang mengakar, jaringan sosial yang solid antarwarga, serta peran sentral tokoh masyarakat dalam memobilisasi dukungan pascabencana. Dalam situasi krisis, hubungan sosial yang telah terjalin sebelumnya bertransformasi menjadi sumber daya strategis yang tidak hanya membantu masyarakat untuk bertahan, tetapi juga mempercepat akselerasi proses pemulihan. Bukti nyata dari solidaritas ini terlihat saat banjir mulai melanda hingga surut, di mana masyarakat secara spontan bahu-membahu membersihkan lingkungan dan memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak, sebagaimana diungkapkan dalam kutipan informan KN (35) sebagai berikut:"

"...Setelah air mulai surut, warga di sini langsung bergerak saling membantu membersihkan rumah dan jalan yang dipenuhi lumpur, kayu, batu, dan sisa material banjir lainnya. Tidak ada yang menunggu disuruh, semua masyarakat langsung turun bersama-sama membantu karena melihat kondisi lingkungan yang memang sangat parah waktu itu. Situasi ini menunjukkan adanya solidaritas sosial yang kuat di antara warga, di mana rasa kebersamaan menjadi modal utama dalam mempercepat proses pemulihan awal pascabencana dan mengurangi beban yang ditanggung masing-masing keluarga..." (Wawancara pada 09 Mei 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pascabencana banjir, masyarakat memiliki tingkat solidaritas sosial yang tinggi dalam menghadapi kondisi lingkungan yang rusak. Keterlibatan warga secara spontan dalam kegiatan pembersihan rumah dan fasilitas umum mencerminkan adanya rasa kebersamaan dan kepedulian kolektif tanpa instruksi formal. Hal ini mengindikasikan bahwa modal sosial berupa gotong royong menjadi faktor penting dalam mempercepat proses pemulihan awal, sekaligus membantu meringankan beban individu yang terdampak. Dengan demikian, solidaritas masyarakat berperan sebagai mekanisme adaptif yang memperkuat ketahanan sosial di tengah situasi bencana.

Selain gotong royong masyarakat, modal sosial juga terlihat melalui peran tokoh masyarakat dan jaringan sosial dalam membantu koordinasi penanganan pascabencana. Tokoh masyarakat bersama aparat setempat turut berperan aktif dalam proses pendataan warga terdampak serta penyampaian informasi terkait bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan figur lokal memiliki peran penting sebagai penghubung antara warga dan pihak pemerintah, sehingga proses penanganan bencana dapat berjalan lebih terarah dan efektif. Sebagaimana diungkapkan oleh informan MA (41) sebagai berikut:

"...Waktu itu ketua RT, tokoh masyarakat, dan aparat setempat ikut membantu mengatur warga serta mendata masyarakat yang terdampak. Mereka juga membantu menyampaikan informasi mengenai bantuan yang masuk dan kebutuhan warga yang harus diprioritaskan. Peran ini sangat membantu memperlancar koordinasi di lapangan karena masyarakat dapat lebih cepat menerima informasi yang jelas dan terarah, sehingga proses penanganan pascabencana menjadi lebih efektif..." (Wawancara pada 09 Mei 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tokoh masyarakat, ketua RT, dan aparat setempat memiliki peran strategis dalam penguatan modal sosial pada tahap penanganan pascabencana. Keterlibatan mereka dalam pendataan korban serta penyampaian informasi bantuan mencerminkan adanya sistem koordinasi berbasis komunitas yang berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pihak eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan sosial lokal berperan penting dalam mempercepat distribusi informasi dan bantuan, sehingga penanganan bencana dapat berlangsung lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan warga terdampak.

Dukungan bantuan sosial dari berbagai pihak juga menjadi bagian penting dari modal sosial masyarakat pascabencana. Ibuk Santi menjelaskan bahwa bantuan yang diterima masyarakat berasal dari pemerintah, relawan, komunitas, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Bantuan tersebut tidak hanya berupa kebutuhan pokok, tetapi juga dukungan logistik, tenaga, serta kepedulian sosial yang membantu meringankan beban warga terdampak. Kondisi ini menunjukkan adanya kolaborasi lintas aktor dalam proses penanganan bencana yang memperkuat daya pulih masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh informan SA (50) dan DE (45) sebagai berikut:

“...Bantuannya waktu itu datang dari banyak pihak. Ada yang dari individu atau masyarakat biasa, ada juga dari pemerintah, komunitas, relawan, dan beberapa instansi terkait yang ikut membantu masyarakat di sini. Selain itu, ada juga bantuan dari kampus dan siswa-siswa SMA yang datang memberikan bantuan untuk warga terdampak banjir. Hal ini menunjukkan bahwa solidaritas sosial tidak hanya terbatas pada lingkungan lokal, tetapi juga meluas ke berbagai lapisan masyarakat, sehingga memperkuat proses pemulihan dan meringankan beban warga yang terdampak...” (Wawancara pada 09 Mei 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penanganan pascabencana diwarnai oleh keterlibatan berbagai pihak yang mencerminkan kuatnya solidaritas sosial lintas kelompok. Bantuan yang datang dari pemerintah, masyarakat, komunitas, relawan, hingga institusi pendidikan memperlihatkan adanya jejaring sosial yang luas dalam merespons bencana. Kondisi ini menegaskan bahwa modal sosial tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga bersifat eksternal yang saling terhubung, sehingga mampu mempercepat proses pemulihan serta meringankan beban masyarakat terdampak melalui dukungan material maupun non-material.

Berdasarkan berbagai temuan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa modal sosial masyarakat di Kelurahan Kapalo Koto memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi dan memulihkan dampak bencana banjir. Modal sosial tersebut tercermin melalui kuatnya praktik gotong royong yang muncul secara spontan dalam membantu pembersihan lingkungan dan pemulihan awal, yang menunjukkan adanya solidaritas dan kepedulian kolektif di tingkat masyarakat. Selain itu, peran tokoh masyarakat, ketua RT, dan aparat setempat juga menjadi elemen kunci dalam memperkuat koordinasi, terutama dalam pendataan korban serta distribusi informasi bantuan, sehingga proses penanganan bencana menjadi lebih terarah. Tidak hanya itu, dukungan dari berbagai pihak eksternal seperti pemerintah, relawan, komunitas, mahasiswa, hingga institusi pendidikan memperluas jejaring solidaritas sosial yang ada. Dengan demikian, modal sosial dalam bentuk jaringan, kepercayaan, dan kerja sama baik di tingkat lokal maupun eksternal terbukti mampu mempercepat proses pemulihan serta mengurangi beban masyarakat terdampak bencana.

Resiliensi Masyarakat Pascabencana di Kapalo Koto

Resiliensi masyarakat di Kelurahan Kapalo Koto terlihat melalui kemampuan masyarakat untuk beradaptasi, meningkatkan kesiapsiagaan, serta tetap melanjutkan kehidupan di tengah berbagai keterbatasan pascabencana. Pengalaman menghadapi banjir bandang membuat masyarakat mulai membangun berbagai bentuk kewaspadaan baru untuk mengurangi risiko apabila bencana kembali terjadi, seperti menjadi lebih waspada terhadap kondisi cuaca dan perubahan debit air sungai, serta mulai menyiapkan kebutuhan darurat sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana kembali. Sebagaimana diungkapkan MI (50) dan DI (37) sebagai berikut:

“...Sekarang kami jadi lebih sering memantau kondisi sungai, apalagi kalau hujan deras turun dalam waktu yang cukup lama. Pengalaman banjir kemarin membuat masyarakat lebih waspada karena takut kejadian yang sama terulang kembali. Kalau air sungai mulai naik, biasanya warga langsung saling memberi tahu supaya semua bisa lebih siap. Selain itu, sekarang masyarakat juga mulai menyiapkan tas darurat yang berisi dokumen penting, pakaian seperlunya, dan barang-barang yang dibutuhkan kalau sewaktu-waktu harus mengungsi...” (Wawancara pada 09 Mei 2026).

Temuan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kapasitas adaptasi dan kesiapsiagaan masyarakat pascabencana banjir. Pengalaman sebelumnya mendorong warga untuk lebih peka terhadap tanda-tanda alam, seperti kondisi curah hujan dan kenaikan debit air sungai, sebagai bentuk mitigasi berbasis pengalaman langsung. Selain itu, munculnya kebiasaan saling memberi informasi antarwarga ketika kondisi sungai mulai meningkat mencerminkan penguatan jaringan komunikasi informal dalam komunitas. Persiapan tas darurat juga menandakan adanya perubahan perilaku menuju kesiapsiagaan yang lebih sistematis, di mana masyarakat mulai mengantisipasi kebutuhan dasar saat evakuasi. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa resiliensi masyarakat terbentuk melalui pembelajaran dari pengalaman bencana yang memperkuat kesadaran risiko dan strategi bertahan hidup.

Selain melakukan berbagai bentuk adaptasi, masyarakat juga masih menghadapi tantangan pascabencana yang kompleks, terutama terkait kondisi psikologis dan keterbatasan fasilitas dasar. Fenomena trauma kolektif yang dipicu oleh cuaca ekstrem menunjukkan bahwa dampak bencana tidak sekadar bersifat fisik, tetapi telah terinternalisasi menjadi ancaman psikologis yang membatasi ruang gerak serta ketenangan warga dalam keseharian. Lebih lanjut, keterbatasan akses air bersih di hunian sementara menegaskan adanya 'kerentanan sekunder', di mana warga terpaksa menanggung beban penurunan standar kualitas hidup dasar tepat saat mereka sedang berupaya membangun kembali tatanan kehidupan yang hilang. Kondisi yang menekan ini mencerminkan bahwa transisi menuju pemulihan masih menghadapi hambatan struktural yang

signifikan, yang menuntut resiliensi tinggi dari masyarakat untuk terus bertahan di tengah ketidakpastian fasilitas maupun stabilitas mental. Temuan ini diperkuat oleh kutipan wawancara oleh informan IN (41) dan MR (28) sebagai berikut:

“...Iya, kalau hujan turun sampai sekarang kami masih merasa was-was dan trauma. Kadang kalau hujan deras di malam hari, rasa takut itu muncul lagi dan membuat susah tidur karena masih teringat kejadian banjir waktu itu. Selain itu, kami juga berharap ada bantuan air bersih atau fasilitas air yang lebih layak karena air yang digunakan di sini masih keruh dan kuning-kuning. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak bencana tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga meninggalkan tekanan psikologis serta kebutuhan dasar yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh masyarakat terdampak...” (Wawancara pada 09 Mei 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dampak bencana banjir tidak hanya bersifat material, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang berkepanjangan bagi masyarakat. Rasa was-was, trauma, dan gangguan tidur saat hujan deras mengindikasikan adanya pengalaman traumatis yang masih membekas dan memengaruhi kondisi emosional warga. Selain itu, keluhan terkait kualitas air bersih menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar pascabencana belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga memperpanjang kerentanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, hal ini menegaskan bahwa proses pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga aspek psikologis dan pemenuhan kebutuhan dasar yang masih perlu perhatian lebih lanjut.

Walaupun rumah warga banyak yang hancur akibat bencana, pemerintah bersama pihak terkait menyediakan hunian sementara (huntara) sebagai tempat tinggal darurat bagi para penyintas untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari. Jika dibandingkan, terdapat dua lokasi utama bagi penyintas, yakni huntara di Lubuk Buaya yang dikelola pemerintah, serta huntara di Kapalo Koto yang merupakan inisiatif pihak swasta melalui tokoh masyarakat dan pengusaha. Khusus di lokasi Kapalo Koto tempat penelitian ini dilakukan yang tersedia 100 unit kamar dengan fasilitas yang relatif memadai, seperti akses Wi-Fi, listrik, serta ketersediaan air bersih. Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan adanya upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Namun, terlepas dari kondisi fisik yang tampak cukup layak, muncul dinamika menarik di mana sebagian warga justru lebih memilih mengonsumsi air galon dibandingkan menggunakan sumber air yang tersedia di lokasi. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas, tetapi juga menyangkut tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas lingkungan dan sanitasi. Dengan demikian, kehidupan di huntara merepresentasikan fase transisi yang kompleks, di mana pemulihan fisik belum sepenuhnya diikuti oleh pemulihan sosial dan psikologis warga terdampak. Hasil temuan ini diperkuat dengan kutipan wawancara oleh informan DE (45) dan DI (37), yaitu sebagai berikut:

“...Iya, hunian sementara karena masyarakat di sini rumahnya habis dan sudah tidak layak ditinggali. Tempat pengungsian ini ada dua, ada yang di Lubuk Buaya yang dikelola pemerintah dan di sini yang mandiri dari Bapak Basko dan Bapak Raffi Ahmad. Mereka merasa simpati melihat warga yang tidak memiliki tempat tinggal dan tidak tahu harus pergi ke mana, sehingga muncul inisiatif untuk membangun tempat pengungsian ini. Dampak bencana terjadi pada 28 November, kemudian kami baru pindah ke sini sekitar bulan Januari. Sebelum adanya tempat ini, warga tinggal dengan cara mengontrak, menumpang di rumah saudara, atau di mana saja yang dianggap aman. Terdapat sekitar 100 kepala keluarga yang tinggal di sini. Saya sendiri berasal dari daerah dekat jembatan yang putus, sementara sebagian warga lainnya berasal dari Batu Busuk. Kami sudah tinggal di sini sekitar empat bulan...” (Wawancara pada 09 Mei 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa hunian sementara (huntara) hadir sebagai solusi darurat bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Kondisi rumah yang rusak dan tidak layak huni memaksa warga untuk berpindah dan menyesuaikan diri dengan berbagai bentuk tempat tinggal sementara sebelum akhirnya menempati huntara. Proses relokasi yang tidak langsung terjadi setelah bencana juga memperlihatkan adanya fase ketidakpastian, di mana masyarakat harus mencari alternatif tempat tinggal seperti mengontrak atau menumpang di rumah kerabat. Kehadiran huntara yang dikelola oleh pemerintah maupun inisiatif pihak swasta menunjukkan adanya kolaborasi dalam penanganan pascabencana, sekaligus menjadi bentuk kepedulian sosial terhadap warga terdampak. Selain itu, adanya sekitar 100 kepala keluarga yang tinggal dalam satu lokasi menggambarkan besarnya skala dampak bencana serta pentingnya penyediaan hunian sementara sebagai ruang transisi menuju pemulihan kehidupan masyarakat.



Gambar 2. Potret Deretan Kamar Huntara Kapalo Koto

Sumber: Dokumen Peneliti, 2026



Gambar 3. Pemanfaatan Ruang Teras Huntara untuk Menjemur Pakaian

Sumber: Dokumen Peneliti, 2026

Sebagaimana yang terlihat pada Gambar 2 di atas, terlihat hunian sementara di Kapalo Koto yang dirancang dengan struktur deretan unit kamar yang saling berhadapan, yang dipisahkan oleh area terbuka berlapis rumput sintetis serta dilengkapi dengan peneduh (*shading net*). Penataan lingkungan yang terstruktur ini bukan sekadar upaya pemenuhan kebutuhan fisik, melainkan juga berfungsi sebagai jangkar psikologis yang membantu warga mempertahankan keteraturan dan kenyamanan hidup di tengah ketidakpastian proses pemulihan pascabencana. Penggunaan elemen peneduh dan rumput sintetis di area komunal tersebut juga mencerminkan upaya mitigasi termal sekaligus penciptaan ruang sosial yang lebih manusiawi bagi para penyintas di tengah keterbatasan fasilitas hunian yang bersifat darurat.

Sedangkan pada Gambar 3 terlihat bagaimana masyarakat memanfaatkan teras hunian untuk menjemur pakaian dan menata barang-barang pribadi di balik pagar kayu sederhana merupakan bentuk adaptasi ruang yang krusial bagi penyintas bencana. Pemanfaatan area terbatas ini secara fungsional tidak hanya menunjukkan upaya warga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, tetapi juga mencerminkan kreativitas dalam mengoptimalkan ruang transisi agar tetap layak huni. Meski kondisi lingkungan huntara sangat terbatas, tindakan sederhana seperti ini menjadi manifestasi dari resiliensi masyarakat dalam menata kembali pola hidup mereka, di mana ruang domestik yang bersifat sementara harus tetap diakomodasi sedemikian rupa untuk menopang rutinitas di tengah proses pemulihan pascabencana.

Berdasarkan temuan keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa resiliensi masyarakat di Kapalo Koto merupakan proses adaptasi yang kompleks antara upaya bertahan secara fisik dan pemulihan kesejahteraan psikososial. Secara fisik, kehadiran hunian sementara (huntara) yang dilengkapi fasilitas terorganisir, seperti yang terlihat pada Gambar 2, telah menjadi jangkar bagi warga untuk mempertahankan keteraturan hidup pascabencana. Namun, efektivitas huntara ini sebagai ruang transisi diuji oleh tantangan keseharian seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3, di mana warga mengoptimalkan ruang terbatas untuk kebutuhan domestik serta adanya beban psikologis akibat trauma banjir dan kekhawatiran terkait kualitas air bersih. Dengan demikian, resiliensi tidak hanya tercermin dari kesiapsiagaan warga dalam memantau tanda-tanda alam dan menyiapkan tas darurat, tetapi juga dari kegigihan mereka dalam menata kembali pola hidup di tengah ketidakpastian fasilitas dan tekanan emosional yang masih membekas hingga masa pemulihan.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kelurahan Kapalo Koto mengalami ketimpangan paparan risiko bencana yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut terlihat dari tingkat kerusakan rumah, kehilangan mata pencaharian, akses terhadap bantuan, serta kemampuan memenuhi kebutuhan

dasar pascabencana. Masyarakat yang tinggal di lokasi paling dekat dengan aliran sungai mengalami kerusakan yang lebih parah dibandingkan masyarakat yang berada pada lokasi yang relatif aman. Selain itu, keterbatasan kondisi ekonomi menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan yang lebih besar dalam proses pemulihan pascabencana.

Menurut konsep ketimpangan paparan risiko bencana yang dikemukakan oleh [Puspitotanti & Karmilah \(2021\)](#), risiko bencana tidak hanya ditentukan oleh ancaman alam, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kerentanan sosial yang dimiliki masyarakat. Dalam perspektif ini, kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan sumber daya ekonomi, akses informasi, dan kapasitas adaptasi cenderung menerima dampak yang lebih besar ketika bencana terjadi ([Yanti, et.al., 2025](#)). Dalam konteks Kelurahan Kapalo Koto, perbedaan tingkat kerusakan rumah, kehilangan pekerjaan, serta kesulitan memenuhi kebutuhan dasar menunjukkan bahwa dampak banjir bandang tidak dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, bencana yang terjadi memperlihatkan adanya ketimpangan paparan risiko berdasarkan kondisi kerentanan sosial masyarakat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian [Bigandata et al. \(2023\)](#) yang menunjukkan bahwa kerentanan sosial dan ekonomi menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat dampak bencana pada masyarakat. Hasil temuan peneliti juga menunjukkan bahwa masyarakat Kapalo Koto yang memiliki keterbatasan sumber daya ekonomi mengalami kesulitan yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan dasar dan melakukan pemulihan pascabencana. Kondisi tersebut turut mendukung temuan [Ekawati & Sulistyowati \(2021\)](#) yang menjelaskan bahwa kerentanan ekonomi merupakan faktor penting yang memperlambat proses pemulihan masyarakat terdampak bencana. Namun demikian, temuan penelitian ini menunjukkan penekanan yang berbeda dengan penelitian [Dartanto et al. \(2022\)](#) yang menekankan bahwa kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat mampu mengurangi dampak ekonomi bencana. Dalam konteks Kapalo Koto, persoalan yang lebih menonjol justru berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, kerusakan tempat tinggal, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pascabencana. Hasil temuan lainnya menunjukkan bahwa modal sosial menjadi faktor penting yang membantu masyarakat bertahan dan bangkit pascabencana. Bentuk modal sosial tersebut terlihat melalui budaya gotong royong, solidaritas sosial, jaringan antarwarga, peran tokoh lokal, serta dukungan bantuan dari berbagai pihak. Ketika masyarakat mengalami keterbatasan ekonomi akibat kerusakan rumah dan hilangnya sumber penghasilan, hubungan sosial yang kuat menjadi sumber daya utama dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan mempercepat proses pemulihan.

Hasil temuan lainnya menunjukkan bahwa modal sosial menjadi salah satu kekuatan utama masyarakat Kapalo Koto dalam menghadapi dampak banjir bandang. Modal sosial tersebut terlihat melalui praktik gotong royong, solidaritas sosial, hubungan saling percaya antarwarga, serta peran tokoh masyarakat dalam membantu proses penanganan dan pemulihan pascabencana. Masyarakat secara spontan saling membantu membersihkan lingkungan, memperbaiki rumah yang rusak, berbagi kebutuhan dasar, hingga memberikan dukungan emosional kepada warga terdampak. Selain itu, jaringan sosial yang kuat juga memudahkan proses penyebaran informasi dan koordinasi bantuan di tengah kondisi darurat. Temuan ini sejalan dengan penelitian [Kurnia & Pandjaitan \(2021\)](#) yang menunjukkan bahwa modal sosial melalui kepercayaan, jaringan sosial, dan aksi kolektif berperan penting dalam memperkuat resiliensi komunitas rawan bencana tsunami. Penelitian [Kasim et al. \(2021\)](#) juga menunjukkan bahwa norma, nilai, dan jaringan sosial yang berkembang dalam masyarakat berfungsi sebagai modal sosial yang mampu memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Kuatnya modal sosial tersebut menunjukkan bahwa proses pemulihan pascabencana tidak hanya ditentukan oleh bantuan material, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat membangun kerja sama dan tindakan kolektif dalam menghadapi situasi krisis. Kondisi modal sosial yang ditemukan dalam penelitian ini juga bukan merupakan fenomena yang berdiri sendiri, melainkan ditemukan pada berbagai komunitas terdampak bencana di Indonesia. Namun demikian, temuan ini menunjukkan penekanan yang berbeda dengan penelitian [Rizky et al. \(2024\)](#) yang menemukan bahwa resiliensi masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh modal sosial, tetapi juga oleh faktor psikologis dan pengalaman emosional penyintas pascabencana. Dalam konteks Kapalo Koto, modal sosial terbukti membantu masyarakat bertahan dan beradaptasi, meskipun masyarakat masih menghadapi berbagai keterbatasan ekonomi dan kebutuhan dasar selama proses pemulihan berlangsung.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan paparan risiko bencana, modal sosial, dan resiliensi masyarakat merupakan tiga aspek yang saling berkaitan. Ketimpangan paparan risiko menyebabkan masyarakat mengalami tingkat kerentanan yang berbeda-beda. Namun, kuatnya modal sosial yang dimiliki masyarakat Kapalo Koto mampu berfungsi sebagai sumber daya kolektif yang membantu proses adaptasi dan pemulihan pascabencana. Modal sosial tersebut kemudian menjadi fondasi utama dalam membangun resiliensi masyarakat sehingga masyarakat mampu bertahan, beradaptasi, dan bangkit kembali setelah mengalami bencana. Dengan demikian, resiliensi masyarakat tidak hanya

ditentukan oleh bantuan material, tetapi juga oleh kekuatan hubungan sosial yang berkembang di tengah masyarakat pascabencana.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan paparan risiko bencana di Kelurahan Kapalo Koto menyebabkan perbedaan tingkat kerentanan masyarakat pascabencana banjir bandang, di mana modal sosial seperti gotong royong dan jaringan antarwarga menjadi sumber daya kunci dalam membangun resiliensi kolektif untuk pemulihan. Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan pentingnya pemerintah untuk mengintegrasikan pendekatan *soft-mitigation* melalui penguatan modal sosial ke dalam kebijakan manajemen bencana agar distribusi bantuan menjadi lebih inklusif dan efektif. Meski penelitian ini berhasil memetakan dinamika tersebut secara mendalam, penelitian ini memiliki keterbatasan pada lingkup fokus yang spesifik di Kelurahan Kapalo Koto, sehingga generalisasi temuan terhadap wilayah dengan karakteristik budaya berbeda perlu dilakukan secara berhati-hati. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian pada wilayah terdampak lainnya, menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran, serta mengkaji lebih mendalam peran kebijakan pemerintah dan faktor ekonomi sebagai variabel pelengkap dalam memperkuat resiliensi masyarakat pascabencana.

Rujukan

- Aditiya, A., Nasution, D. A., Siregar, D. M., & Aini, N. (2025). Mitigasi dan dampak sosial banjir di Kota Medan: Kajian terpadu terhadap faktor penyebab, respons masyarakat, dan peran pemerintah daerah. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(2). <https://doi.org/10.36989/didaktik.v11i02.7344>.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat. (2026). *Mitigasi Bencana*. Diakses pada 12 Juni 2026, dari <https://bpkad.sumbarprov.go.id/mitigasi-bencana/>.
- Bakarbesy, D. (2024). Resiliensi komunitas dalam menghadapi bencana: Literature review pendekatan kesejahteraan sosial di wilayah rawan bencana. *JiIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 7(12), 14350–14356.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat. (n.d.). *Mitigasi bencana*. BPKAD Provinsi Sumatera Barat. <https://bpkad.sumbarprov.go.id/mitigasi-bencana/>
- Bigandata, Y., Wahyuni, P., & Maharani, Y. N. (2023). Kerentanan sosial dan ekonomi pada bencana banjir di Kelurahan Sutojayan Kabupaten Blitar. *Indonesian Journal of Environment and Disaster*, 2(1). <https://doi.org/10.20961/ijed.v2i1.688>.
- Coleman, James S. 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95–S120.
- Dartanto, T., Moeis, J. P., Syafitri, W., Ikhsan, M., Usman, & Rezki, J. F. (2022). Natural disasters, mitigation and household welfare in Indonesia: Evidence from a large-scale longitudinal survey. *Cogent Economics & Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2037250>
- Ekawati, J., & Sulistyowati, E. (2021). Kerentanan ekonomi di area permukiman terdampak bencana Lumpur Lapindo, Sidoarjo. *Jurnal Permukiman*, 16(1), 41–53. <https://doi.org/10.31815/jp.2021.16.41-53>.
- Hariadi, K. L. (2025). Kajian implementasi tata kelola penganggaran pembangunan perumahan akibat bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis*, 16(3).
- Kasim, F. M., Nurdin, A., & Rizwan, M. (2021). Agama, modal sosial dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana di Kota Banda Aceh. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 23(1), 66–73. <https://doi.org/10.25077/jantro.v23.n1.p66-73.2021>.
- Kurnia, I. A., & Pandjaitan, N. K. (2021). Peranan modal sosial dalam resiliensi komunitas rawan bencana tsunami (Kasus: Dusun Suka Dame, Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten). *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, 5(1), 85–104.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Mulia, F. A., & Handayani, W. (2024). Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan Kerawanan Bencana Banjir Kota Padang Tahun 2011-2022. *Geoid*, 19(2), 192–201. <https://www.researchgate.net/publication/382368267>.
- Mutia, S., & Wijayanto, B. (2025). Dampak bencana galodo (banjir bandang) terhadap sosial ekonomi masyarakat Nagari Pandai Sikek Kabupaten Tanah Datar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4), 300. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.35423>

-
- Ningsih, U., Alpendi, & Dewi, A. S. (2024). Kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia: Penyebab, dampak, dan solusi kebijakan. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSai)*, 5(3), 426–445.
- Nurmaliza, F. D., Yusnita, R., Adbaida, Hilmi, A. A., Wardayani, R., Fathirizqi, A. N., & Marwenny, E. (2024). Mengulas regulasi terkait upaya penanggulangan banjir di Kota Padang. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 30–37.
- Pemerintah Kota Padang. (2025). *Update Bencana Kota Padang, Ribuan Warga Terdampak dan Terpaksa Mengungsi*. <https://padang.go.id/berita/update-bencana-kota-padang-ribuan-warga-terdampak-dan-terpaksa-mengungsi>.
- Puspitotanti, E., & Karmilah, M. (2021). Kajian kerentanan sosial terhadap bencana banjir. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 177–197.
- Rasyid, S. J., & Suhaeb, F. W. (2023). Resiliensi masyarakat terhadap bencana banjir. *Tebar Science: Jurnal Kajian Sosial dan Budaya*, 7(3), 103–111.
- Rizky, C. G., et al. (2024). Resiliensi pascabencana: Eksplorasi pengalaman sosial dan emosional penyintas tsunami Aceh. *Jurnal Integrasi Riset Psikologi*.
- Rizqiani, A. P., Meisya, R., Khoeriah, S., & Septiadi, M. A. (2025). Persepsi masyarakat terhadap respon pemerintah dalam penanganan bencana banjir di Kecamatan Baleendah. *Jendela Kota: Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Kota*, 2(2), 77–90.
- Sari, E. D., & Handayani, B. L. (2022). Ketimpangan sosial dan bencana: Suatu analisis sosiologis terhadap dampak bencana berbasis kelas sosial. *Hasanuddin Journal of Sociology (hjs)*, 4(1).
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Syahrani, K., & Triyono, T. (2025). Resiliensi komunitas pada masyarakat terdampak erupsi Gunung Merapi. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 10(1), 7.
- Yanti, N., Ramadini, I., Metti, E., Netti, Renidayati, & Zicof, E. (2025). Efektifitas pemberdayaan kelompok rentan daerah pesisir dalam upaya mitigasi bencana di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. *Jurnal Salingka Abdimas*, 5(1), 11–19.
- Yolanda, M. N., & Fahmi, K. (2025). Mitigasi bencana galodo berbasis kearifan lokal di Nagari Pasia Laweh Kabupaten Tanah Datar. *Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 8(3), 370–382. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v8i3.1275>
-